

**Diplomasi Publik
Indonesia Ke Malaysia
Paska Kebijakan
Penenggelaman Kapal
Malaysia Di Laut Indonesia**

Frequency of International Relations
Vol 1 (1) 1-36
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : January 18th, 2019
Accepted : March 05th, 2019
Available On-line : March 05th, 2019

Umaya Beby Umanda

Universitas Andalas
imelda.beby@yahoo.com

Abstract

The main objective of this study is to analyze Indonesian public diplomacy toward the Malaysian public to improve Indonesia positive image following the negative effect of the Indonesia government ship sinking policy. Malaysian public reacts negatively after the Indonesian government sinks Malaysia's ship which illegally fishing in Indonesia territory. Indonesia uses public diplomacy to manage the negative reaction of Malaysia public. This research uses the descriptive method through literature reviews. Researchers adopt the concept of public diplomacy proposed by Kishan S. Rana. There are 3 components, namely News Management, Country as Brand, and An Alternative Approach. This research concludes that Indonesia has conducted public diplomacy to the Malaysian public through news managemen in Indonesian media and Youtube, re-branding with Wonderful Indonesia, and an alternative approach through the cultural expo.

Keywords: Sinking ship; Image; Malaysia; Indonesia; Public Diplomacy

Pendahuluan

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang berbatasan secara langsung baik di laut maupun daratan. Dalam hubungan Indonesia dan Malaysia, Indonesia juga sering kali memposisikan dirinya sebagai saudara yang lebih tua dari Malaysia. Sedangkan Malaysia dianggap sebagai saudara yang lebih muda dari Indonesia (Prasetya 2015, 15). Seorang Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, pada tanggal 8 November 1955 di Jakarta, mengatakan “bahwa tidaklah dapat disangkal oleh dunia akan hubungan antar bangsa Melayu dengan bangsa Indonesia yang mana kita dikenal sebagai dua bangsa yang mendiami gugusan Pulau-pulau Melayu. Sungguh pun kita bercerai di satu babak tapi bersatu yang lain yaitu babak kebudayaan”(Al-Haj 1985).

Selain menjadi negara serumpun, Indonesia dan Malaysia juga telah melakukan hubungan bilateral pada bidang pendidikan, ekonomi, dan juga pada bidang ketenaga kerjaan. Jumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI menurut menteri Hukum dan HAM, mencapai 2,7 juta. Jumlah ini merupakan jumlah TKI terbesar di dunia (Putra 2018). Indonesia juga banyak mengekspor beras dan jagung ke Malaysia, total dari ekspor yang dilakukan adalah 1 juta ton bera pertahun, dan 3,1 juta ton jagung pertahun. Nilai dari beras dan jagung ini mencapai Rp20 triliun, nilai ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Murdaningsih 2018).

Setelah terpilih sebagai presiden Indonesia pada tahun 2014, Joko Widodo mulai menerapkan sebuah gagasan yang dikenal sebagai 'Poros Maritim Dunia' sebagai visinya untuk Indonesia. Visi ini dapat ditemukan di dalam buku visi dan misi dari Jokowi dan JK untuk mewujudkan politik luar negeri bebas aktif, memperkuat jati diri sebagai negara maritim, dan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional (Prasetya 2015, 22). Sejak adanya visi ini, Indonesia mulai semakin memperketat keamanan di wilayah lautnya. Indonesia juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru secara tegas untuk melindungi sumber daya laut dan daerah perbatasan teritorialnya.

Kondisi Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak laut, menjadikan Indonesia sering kali memiliki konflik di lautnya. Salah satu contoh konflik yang sering kali dialami Indonesia di daerah lautnya adalah penangkapan ikan secara *illegal* yang dilakukan oleh para nelayan dari negara lain, termasuk dari negara Malaysia. Daerah yang sering kali dijadikan tempat para nelayan asing mengambil ikan Indonesia secara *illegal* adalah di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara atau Samudera Pasifik, Selat Makassar, dan Barat Sumatera atau Samudera Hindia (Arief 2018). Kerugian yang dialami Indonesia karena adanya nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia adalah berkurangnya hasil dari sumber daya lautnya. Kerugian ini mencapai USD 25 Miliar setiap tahun. Di wilayah

Sibolga saja, total kerugian ikan yang di alami Indonesia adalah sebanyak 200 ton per hari (Maritingo 2018).

Bentuk-bentuk pencurian ikan milik Indonesia adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan menggunakan izin palsu, menangkap ikan dengan alat tangkap yang sebenarnya dilarang, serta menangkap jenis-jenis ikan yang sebenarnya tidak diizinkan untuk ditangkap (Setyadi 2015, 5).

Maraknya pencurian ikan di Indonesia menyebabkan terjadinya ancaman pada kelestarian sumber daya laut Indonesia. Nelayan pribumi juga ikut mendapat dampak dari kasus pencurian ikan oleh nelayan asing, dimana nelayan pribumi tidak dapat menikmati potensi laut Indonesia secara maksimal karena harus bersaing dengan nelayan asing (Indomaritime 2018). Kemudian para nelayan pribumi juga merasakan susahnya mendapatkan ikan di laut Indonesia sendiri mengingat kapal dan perlengkapan untuk menangkap ikan milik nelayan pribumi masih menggunakan armada yang sederhana jika dibandingkan dengan kapal dan alat-alat modern yang dimiliki oleh nelayan asing, termasuk milik Malaysia (Setyadi 2015, 5). Dilihat di Natuna saja, hasil tangkapan dari para nelayan pribumi selalu berkurang dari waktu ke waktu. Total kerugian yang diakibatkan oleh *illegal fishing* pada wilayah ini mencapai Rp.18 triliun disetiap tahunnya (Rosyita 2018).

Kembali kepada visi dari Presiden Indonesia mengenai Poros Maritim Dunia atau PMD, Indonesia mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tegas untuk melindungi laut dan sumber daya lautnya, yang dilakukan Indonesia adalah melakukan Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/50/MEN/12 mengenai rencana dari aksi nasional dalam pencegahan dan penanggulangan *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing)*. Penanggulangan *IUU fishing* ini sendiri dilakukan dengan cara mengikuti peraturan internasional, dan mulai melakukan penyesuaian legislasi nasional, kemudian menyediakan infrastruktur untuk melakukan pengawasan, seperti kapal yang bertugas untuk mengawas, melakukan patroli di daerah perbatasan, dan juga membentuk peradilan perikanan. (Muhammad 2017, 9-10).

Kemudian lahirlah sebuah kebijakan penenggelaman kapal yang berlandaskan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009, pasal 69. Kebijakan ini pertama kali dicetuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dimana kebijakan ini dilakukan sejak tahun akhir tahun 2014, atau sejak terpilihnya Presiden Joko Widodo hingga sekarang. Tercatat sejak tahun akhir tahun 2014, Indonesia telah menenggelamkan 317 unit kapal pencuri ikan di laut Indonesia. Selama tahun 2016, terdapat 115 kapal asing yang telah ditenggelamkan, dan 27 kapal diantaranya adalah milik Malaysia. (Katadata 2018). Namun jumlah ini sedikit turun jika di

bandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2015 dengan angka 117 kapal yang telah di tenggelamkan. Ini berarti bahwa kebijakan penenggelaman kapal ini berhasil memberikan efek jera kepada nelayan-nelayan asing yang melakukan pencurian ikan di Indonesia (Katadata 2018).

Setelah dilakukannya penenggelaman kapal di laut Indonesia, muncul ketegangan yang berasal dari publik Malaysia. Ketegangan ini bermula dari publik Malaysia yang mulai menyampaikan tanggapannya mengenai penenggelaman kapal ini melalui media-media Malaysia. Publik Malaysia mulai memprotes aksi Indonesia dalam menenggelamkan kapal milik Malaysia. Kementerian Luar Negeri Malaysia, juga menyatakan bahwa penangkapan ini tidakkonsisten dengan pemahaman yang dicapai antara Malaysia dan Republik Indonesia dalam menanggapi insiden terkait perikanan ini (Amanda 2018).

Selain publik Malaysia mulai menyampaikan amarahnya kepada pemerintah Indonesia. Publik menganggap Presiden Joko Widodo angkuh, karena menggunakan pendekatan konfrontasi. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya opini publik melalui media masa Malaysia terkait ketidaksenangan publik dengan kebijakan penenggelaman kapal (Hussain 2018). Kebijakan ini juga dianggap Malaysia akan memperburuk hubungan antara kedua negara. Apalagi hubungan Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1963 memang selalu mengalami

pasang surut (Trisni, 135), membuat Malaysia selalu merespon secara reaktif kebijakan apapun yang di buat oleh Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo ini juga dianggap kurang peduli dengan diplomasi regional. Malaysia juga mulai membandingkan kebijakan ini dengan kebijakan terdahulu dari Presiden Indonesia sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu menegaskan tentang *'Thousand friends, zero enemy'* (Hamzah 2015, 1). Kemudian mereka menyayangkan perjuangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjaga hubungan baik dengan negara tetangga kini harus berakhir setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, media masa Malaysia juga menyelipkan kata-kata "Maaf cakap, inilah Jokowi" (Viva 2018), sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan penenggelaman kapal yang disetujui oleh Presiden Indonesia tersebut. Malaysia juga meminta publik untuk kembali mencermati 'bangsa serumpun' yang selama ini disandang oleh Indonesia dan Malaysia. Jokowi juga dinilai publik Malaysia memilih pendekatan konfrontasi dalam menanggulangi masalah pencurian ikan dan keamanan territorial perbatasannya dengan Malaysia (Viva 2018).

Publik Malaysia mulai mengaitkan kebijakan penenggelaman kapal dengan isu para tenaga kerja Indonesia yang masuk ke Malaysia dengan cara *illegal*. Mereka terus membandingkan masalah penerobosan laut Indonesia dengan penerobosan para TKI *illegal* yang

berasal dari Indonesia ke wilayah Malaysia (Hussain 2018). Media Malaysia juga mengatakan, dalam menangani kasus TKI *illegal*, Malaysia menggunakan cara yang bersifat kemanusiaan dan tidak diluar batas seperti yang dilakukan Indonesia, yaitu menenggelamkan kapal Malaysia dengan cara diledakkan di laut Indonesia. Padahal publik Malaysia mengatakan bahwa TKI *illegal* juga memiliki dampak untuk negara Malaysia sendiri, yaitu masalah keamanan dan juga sosial (Dewi 2018). Publik Malaysia mulai meminta Presiden Jokowi untuk kembali membaca ulang nota kesepahaman yang telah disepahami oleh kedua negara ini pada tahun 2011 lalu (Dewi 2018). Mereka mengatakan bahwa penenggelaman kapal dengan cara pengeboman tidak tercantum di dalam MoU tersebut.

Dari penjabaran diatas, dapat dilihat dampak dari kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia, dengan respon yang diberikan Malaysia pasca penenggelaman kapal, dapat disimpulkan bahwa hubungan Indonesia dan publik Malaysia mulai mengalami ketegangan (Hussain 2018). Dimana kecaman kepada mentreri Susi dan Presiden Joko Widodo mulai di layangkan oleh publik Malaysia melalui media massa (Hussain 2018). Menanggapi ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia mulai mencari cara agar citranya membaik dimata publik Malaysia yang kini telah menganggap buruk citra Indonesia. Indonesia mulai melakukan upaya-

upaya diplomasi publik yang bertujuan untuk memperbaiki citranya di Malaysia (Rohani dan Paidi, 224-227).

Penelitian ini akan berusaha untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki citra Indonesia dimata publik Malaysia. Penelitian ini akan menggunakan kosep diplomasi publik yang dapat diartikan sebagai kegiatan dari pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga non pemerintah untuk menjangkau publik dari negara lainnya. Biasanya diplomasi publik ini dilakukan untuk memperbaiki citra negara dengan cara mempromosikan budaya, melakukan kerjasama pada bidang akademik dengan cara melakukan pertukaran pelajar, dan bentuk-bentuk lainnya (Rana 2005, 77-78).

Lebih jauh, penelitian ini akan menggunakan tiga komponen dari diplomasi publik yang diungkapkan oleh Kishan S Rana, yaitu: Pengelolaan Berita (*News Management*), *Country as Brand*, dan Pendekatan Alternatif (*An Alternative Approach*). *News management* berarti mempengaruhi publik melalui media, hal ini dipicu dengan adanya jaringan informasi global yang dapat menjadikan transmisi berita ke khalayak dunia menjadi lebih cepat. *Country as brand* didapatkan dari dunia periklanan perusahaan yang diciptakan untuk mengubah cara pandang dari masyarakat asing terhadap negaranya. Pendekatan ini termasuk dalam upaya membangun citra dan *re-branding* (Rana 2005, Chapter 5). *Re-branding* menjadi cara untuk

memunculkan atau mempertahankan citrapositif negara pembuat brand tersebut. Sedangkan, Pendekatan alternatif adalah kegiatan yang dilakukan diluar dari skema yang besar, namun memiliki strategi yang terencana dengan tujuan yang sangat jelas.

Upaya Diplomasi Publik Indonesia Ke Malaysia

Sebelum adanya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia paska penenggalaman kapal, diplomasi yang dilakukan Indonesia ke Malaysia tetap bersifat reaktif, yaitu sikap dalam bertindak dengan cara spontan dan tidak berdasarkan kepada nilai-nilai yang dianut dan membiarkan dikendalikan oleh lingkungan sosial, bukan diri sendiri (Rachmawati 2017, 3). Diplomasi publik yang berkarakter reaktif ini juga akan hilang setelah mendapatkan respon, sehingga karakter ini tidak bersifat permanen ataupun berkelanjutan.

Banyak cara lain yang juga dilakukan untuk melancarkan upaya diplomasi publik Indonesia terhadap Malaysia agar citra Indonesia kembali membaik pada masa sebelum adanya penenggalaman kapal. Beberapa contoh upaya lainnya adalah seperti adanya kelompok budaya yang melakukan pertemuan untuk berbagi informasi dan ide tentang hal tertentu, kemudian membuat pertunjukan seni budaya.(Rachmawati 2017, 3). Kedekatan yang dilakukan secara terus menerus ini di harapkan akan menimbulkan kedekatan emosi dan memunculkan kesepahaman. Selain kelompok budaya, upaya lainnya yang dilakukan Indonesia adalah pada bidang pendidikan. Dimana

Indonesia memberikan beasiswa-beasiswanya melalui *international education exchange* (Rachmawati 2017, 3). Diharapkan upaya ini mampu menjadikangenerasi muda dari negara yang menerima beasiswa, untuk dapat melihat langsung sistem politik, budaya, dan nilai dari negara pemberi beasiswa. Dimana sebelumnya mereka hanya mendengarkan segala sesuatu hanya dari media massa, tanpa melihat langsung kedalam sistem Indonesia.

Perlunya memperbaiki citra Indonesia kepada publik Malaysia paska adanya kebijakan penenggalaman kapal juga memiliki alasan tersendiri. Mengingat Indonesia dan Malaysia bertetangga, dan juga merupakan negara serumpun. Dimana Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan tradisi yang didasarkan kepada nilai-nilai seperti kesamaan rumpun bangsa yang sama, kemudian dilanjutkan dengan kesamaan budaya, dan juga agama. Sehingga perlu bagi keduanya untuk tetap memiliki hubungan yang baik (Rachmawati 2017, 3).

Dipilihnya diplomasi publik sebagai salah satu cara pendekatan Indonesia kepada publik Malaysia adalah karena konflik berawal dari protes yang dikemukakan oleh publik Malaysia melalui media Malaysia, yang merupakan perwakilan dari opini masyarakat di negara tersebut.(Lisbet 2014, 6). Diplomasi publik merupakan sebuah instrumen untuk mengubah opini dari negara lain (Lisbet 2014, 6). Indonesia juga telah melakukan diplomasi publik paska adanya kebijakan penenggalaman kapal.(Jannah 2018). Maka diharapkan

setelah melakukan diplomasi publik kepada Malaysia, opini masyarakat Malaysia dapat berubah kepada Indonesia (Jannah 2018).

Presiden Joko Widodo juga mengatakan dalam sebuah pidatonya, untuk memperbaiki citra Indonesia dimata publik dari negara lain, perlu dilakukan diplomasi publik dalam bentuk *branding coutry*, expo budaya, dan mempromosikan kuliner Indonesia (Kemlu RI 2018). Pernyataan yang serupa juga sudah pernah sebelumnya dinyatakan oleh mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (Wirakusuma 2018). Dalam sebuah pidatonya beliau mengatakan dalam membangun kembali citra di Malaysia, perlu menggunakan diplomasi publik, mengingat Indonesia seringkali terlibat masalah dengan publik Malaysia seperti masalah-masalah yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Wirakusuma 2018).

Selain upaya-upaya yang disebutkan pada bagian sebelumnya, juga ada upaya diplomasi publik lainnya, yaitu *country as brand*, dimana upaya ini juga dilakukan Indonesia untuk membangun kembali citra Indonesia atau *re-branding*. (Rana 2005, 78). Contoh dari *country as brand* Indonesia adalah *Wonderful Indonesia* dan *Remarkable Indonesia* (Kuwado 2018). Kedua *brand* ini akan berpengaruh dengan reputasi Indonesia, dan memberikan dampak untuk hubungan ekonomi dan politik Indonesia dan Malaysia, serta juga menjangkau publik Malaysia.

Diplomasi publik dikenal sebagai upaya dalam menjaga kesepahaman dan juga relasi keberadaan diri dalam pergaulan antar negara. Diplomasi publik ini juga diperlukan sebagai upaya komunikatif dalam memperbaiki konflik antar negara, seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia pasca adanya kebijakan penenggalaman kapal di laut Indonesia (Rachmawati 2017, 1-2).

Pengelolaan Berita melalui Media Indonesia

Didalam pengelolaan berita, terdapat beberapa turunan lainnya, yang pertama adalah berita atau informasi yang disajikan tidak hanya ditujukan untuk satu orang saja, melainkan untuk khalayak banyak. Media Indonesia mulai menyajikan berita-berita seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tertuju tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, namun juga tertuju untuk masyarakat asing, termasuk Malaysia. Sebelumnya Menteri Susi Pudjiastuti juga telah memerintahkan wartawan Indonesia untuk membuat pemberitaan terkait penenggalaman kapal yang dilakukan Indonesia sebagai respon dari kecaman dari publik Malaysia melalui media Malaysia (Sari 2018).

Media Indonesia kemudian merespon pemberitaan ini melalui situs-situs berita yang dapat dicapai oleh Malaysia, seperti situs berita yang memiliki situs *online*, atau media *online* yang kemudian dibaca oleh publik Malaysia. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat Malaysia sudah sangat aktif dalam menggunakan internet dan media sosial, menjadikan informasi yang diberitakan oleh Indonesia cepat

sampai karena adanya transmisi berita secara global. Jejaring sosial juga mempengaruhi masyarakat Malaysia itu sendiri (Rahman 2018). Sehingga ketika adanya *statement* yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, hal itu akan sampai pada Malaysia dan dapat berpengaruh pada cara pandang Malaysia setelahnya.

Media *online* Indonesia, seperti liputan6.com, detik.com, republika, dan lainnya mulai memiliki banyak peran dalam mengelola media Indonesia. Dimana adanya kemudahan dalam mengakses media *online* ini menjadikan media *online* bukan hanya media untuk menyampaikan informasi, tapi juga sebagai upaya dari pemerintah untuk merubah cara pandang publik Malaysia. Hal seperti ini pernah dilakukan Indonesia pada saat terjadi konflik Ambalat dengan Malaysia beberapa tahun yang lalu (Amalia 2009).

Media *online* Indonesia mulai menggunakan representasi atau gambaran yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam memberitakan kasus penenggelaman kapal, dan kemudian akan memunculkan citra yang positif bagi Indonesia (Amalia 2009).

Liputan6.com, detik.com, republika, kompas.com, merdeka.com, tempo.co, dan media *online* lainnya mulai mengeluarkan pemberitaan tentang penjelasan dari pemerintah Indonesia tentang kebijakan penenggelaman kapal. Dimana kebijakan ini berlandaskan pada Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

(UU Perikanan) (Amalia 2009). Sehingga, media *online* Indonesia mulai melakukan pengelolaan kata, atau jurnalisme investigatif dalam pemberitaannya, dengan menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah sebuah bentuk ketegasan dari seorang pemimpin negara, bukan sebuah keangkuhan seperti yang telah dituduhkan oleh publik Malaysia (Fauzi 2018).

Selanjutnya, pengelolaan berita biasanya berasal dari kepala pemerintah. Dapat dilihat bahwa *statement* yang dikeluarkan oleh Indonesia terkait kebijakan penenggelaman kapalnya berasal dari seseorang yang terkait dengan pemerintahan Indonesia.(Rana 2005). Seperti Djarot Saiful yang merupakan seorang anggota komisi II DPR, kemudian Menteri Susi Pudjiastusi yang merupakan Menteri Perikanan dan Kelautan atau KKP (Merdeka 2018).

Dalam melakukan Pengelolaan berita, kontrol atau meninjau kata sangat diperlukan untuk membentuk atau mengubah persepsi yang akan ditujukan untuk publik Malaysia. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya tentang citra Indonesia yang memburuk setelah adanya kebijakan penenggelaman kapal. Dengan adanya pengelolaan berita yang dikeluarkan oleh media Indonesia, diharapkan dapat membentuk persepsi baru yang dapat memperbaiki citra Indonesia di Malaysia (Ernis 2018). Seperti yang sebelumnya Malaysia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo angkuh, setelah adanya pengelolaan berita, diharapkan muncul persepsi baru bahwa

kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo adalah sebuah bentuk ketegasan dari seorang pemimpin, bukan sebuah bentuk keangkuhan seperti yang dituduhkan oleh publik Malaysia (Ernis 2018).

Cara lain yang dilakukan media Indonesia adalah melakukan kontrol bahasa, yaitu kembali mengeluarkan pemberitaan tentang hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia yang hingga kini masih baik-baik saja. Kemudian wartawan dari Malaysia juga merespon dan ikut mengeluarkan pemberitaan tentang hubungan yang dijalin kedua negara ini tetap berjalan baik-baik saja paska adanya kebijakan penenggelaman kapal (Mstar 2018). Melalui media Malaysia, wartawan melakukan kontrol bahasa yang mengatakan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia tetap erat dan diharapkan tetap terjalin hingga masa yang akan datang (Mstar 2018). Kontrol bahasa ini diharapkan akan mengubah kembali persepsi publik sebelumnya yang menentang kebijakan penenggelaman kapal, karena menurut mereka akan memperburuk hubungan bilateral kedua negara ini. Namun, setelah adanya *statement* dari Indonesia dan disampaikan pada publik Malaysia melalui media Malaysia mengenai hubungan bilateral yang terjalin antara kedua negara ini tetap baik-baik saja paska kebijakan penenggelaman kapal, publik Malaysia akan merespon positif kebijakan yang dikeluarkan Indonesia ini, karena tidak mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.

Selanjutnya, paska adanya kecaman dari publik Malaysia, presiden Joko Widodo melakukan kunjungannya ke Malaysia, dan para wartawan Malaysia yang hadir kemudian melakukan pengelolaan berita terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia untuk mempererat hubungan kedua negara ini (Bernama 2018). Didalam pemberitaan yang dikeluarkan di media Malaysia, kunjungan ini sebagai bentuk memperat hubungan Indonesia dan Malaysia, dan sebagai tanda mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia yang saat ini masih baik-baik saja paska kebijakan penenggelaman kapal (Bernama 2018). Dengan adanya pengelolaan berita seperti ini pada media Malaysia, diharapkan citra Indonesia akan membaik dimata publik Malaysia.

Dapat dilihat dan disimpulkan bahwa media Indonesia banyak memiliki peran dalam pengelolaan berita terkait masalah yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, begitu juga dengan media Malaysia yang melakukan pengelolaan beritanya mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Upaya selanjutnya, pemerintahan Indonesia mulai melakukan pengelolaan berita melalui video yang diunggah di akun Youtube.

Pengelolaan Berita Melalui Youtube

Upaya selanjutnya yang dilakukan Indonesia untuk memperbaiki citranya adalah mengunggah sebuah video dari Menteri Susi Pudjiastuti yang menyampaikan segala hal terkait kebijakan

penenggelaman kapal di Youtube melalui akun resmi kementerian kelautan dan perikanan, atau KKP.(Fauzi 2018). Di dalam video tersebut, menteri Susi menjelaskan secara *detail* mengenai kebijakan penenggelaman kapal ini, serta solusi kepada negara yang menolak adanya kebijakan ini, termasuk Malaysia. Menteri Susi didalam videonya juga berharap agar pihak yang menentang kebijakan ini dapat mengerti tentang hukum yang ada di Indonesia, dan segera mendukung hal tersebut.

Menteri Susi juga pernah memberikan komentarnya terkait respon dari publik Malaysia mengenai kebijakan penenggelaman kapal ini. Menteri Susi mengatakan bahwa penenggelaman kapal memiliki dasar hukum, dan Indonesia hanya menegakkan kembali hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, Menteri Susi juga mengatakan kepada wartawan untuk membuat ulasan di media sebagai bentuk respon dari Indonesia terkait pemberitaan yang dikeluarkan oleh Malaysia.(Sari 2018).

Publik Malaysia yang sebelumnya menolak kebijakan ini, diharapkan dapat melihat video ini dan mengubah persepsi sebelumnya terkait kebijakan penenggelaman kapal ini. Seperti yang diketahui bahwa publik Malaysia termasuk aktif dalam mengakses media sosial, termasuk Youtube.(Rahman 2018). Sehingga klarifikasi yang di unggah oleh menteri Susi dapat mengubah persepsi publik Malaysia terkait

kebijakan penenggelaman kapal Indonesia yang telah menenggelamkan kapal-kapal milik Malaysia.

Youtube memiliki pengaruh yang cukup besar, dimana Youtube menyediakan fasilitas untuk dapat membagikan video yang kemudian akan diakses oleh siapa saja. Asia memegang urutan ke-3 pada posisi pengguna Youtube. Sebuah penelitian juga menyebutkan bahwa Youtube sangat cepat dalam menghantarkan berita daripada para jurnalis professional menghantarkan berita (Wijayana 2018).

Isi dari video Youtube yang diunggah oleh KKP adalah penjelasan secara detil mengenai kebijakan penenggelaman kapal. Dimana menteri Susi Pudjiastuti mengatakan di dalam video tersebut mengenai penenggelaman kapal yang merupakan sebuah tugas negara dalam menjalankan amanah dari Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009. Menteri Susi Pudjiastuti juga menyebutkan kebijakan ini sebagai bentuk ketegasan dari Presiden Joko Widodo untuk menghentikan atau menyelesaikan masalah pencurian ikan yang masih begitu masif di Indonesia. Keputusan untuk menenggelamkan kapal-kapal ini juga berdasarkan dari keputusan pengadilan. Menteri Susi juga mengatakan, jika ada pihak yang keberatan mengenai penenggelaman kapal pencuri ikan, harus membuat suatu usulan yang ditujukan kepada Presiden, untuk memerintahkan menterinya mengubah undang-undang perikanan tersebut, dan kemudian menteri akan mengajukan kepada Badan

Legislasi DPR untuk membuat undang-undang yang baru yang meniadakan pasal tentang penenggelaman kapal pencuri ikan. Di akhir videonya, menteri Susi Pudjiastuti juga kembali mengingatkan bahwa penenggelaman kapal ini merupakan keputusan pengadilan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau KKP hanya bertugas untuk mengeksekusi keputusan pengadilan tentang pemusnahan kapal dengan penenggelaman. Presiden juga memiliki sebuah keputusan untuk me-mediakan kebijakan penenggelama kapal ini untuk mendapatkan *deterrent effect*. Menteri Susi Pudjiastuti juga berharap agar kontra atau respon negatif tentang kebijakan ini bisa selesai setelah adanya video klarifikasi yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau KKP (KKP 2018).

Negara Sebagai Brand (*Country as Brand*)

Membuat sebuah *brand* pada negara dapat mengubah cara pandang masyarakat asing terhadap negara pembuat brand. Hal ini juga termasuk upaya dalam membangun citra dari negara pembuat brand. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa dalam memperbaiki ataupun membangun citra Indonesia, maka perlu dilakukan *re-branding* (Presidenri 2018).

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, Jero Wacik mulai menyampaikan pergantian brand Indonesia dari *Visit Indonesia* menjadi *Wonderful Indonesia*. Pergantian ini dilakukan pada akhir tahun 2011.(Indriasih 2016). Hal inijuga memiliki alasan, yaitu untuk

memperbaiki citra Indonesia melalui brand yang dimiliki Indonesia. Indonesia juga menjadikan Malaysia sebagai *main market* dalam melakukan promosi *Wonderful Indonesia* (Indriasih 2016).

Bagi Indonesia, citra merupakan hal yang penting. Ketika citra Indonesia mulai buruk dimata publik Malaysia, Indonesia mulai melakukan upaya brandingnya ke Malaysia melalui program-program dari *Wonderful Indonesia* (Indriasih 2016). Bagi Indonesia, citra memanglah sangat penting. Selain untuk memperbaiki citranya, dengan adanya *branding country* ini diharapkan dapat meningkatkan pengunjung dari Malaysia, investasi di Indonesia, dan meningkatkan ekspor non-migas dari Indonesia (Presidenri 2018). Selain itu, Malaysia juga memiliki banyak arti penting bagi Indonesia, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga Indonesia perlu memperbaiki citranya melalui brand yang dikeluarkannya seperti *Wonderful Indonesia*.

Citra juga merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara (Warta Ekspor 2018). Itulah sebabnya Indonesia menggunakan *branding country* untuk memperbaiki kembali citranya di Malaysia. Citra Indonesia bukan hanya dilihat sebagai *brand* produk Indonesia, atau hanya logo dan *tagline* saja. Namun Indonesia juga menciptakan sebuah iklan yang diharapkan memiliki kesan yang akan diingat oleh masyarakat asing yang melihatnya (Warta Ekspor 2018). Hal ini juga akan mempengaruhi citra positif Indonesia.

Wonderful Indonesia

Wonderful Indonesia merupakan sebuah brand milik Indonesia yang dikeluarkan oleh kementerian pariwisata. Presiden Joko Widodo juga telah mengatakan didalam pidatonya, bahwa *Wonderful Indonesia* adalah sebuah upaya dalam memperbaiki citra Indonesia (Kemlu RI 2018). Beliau menegaskan bahwa brand ini merupakan instrumen *soft power* Indonesia untuk berdiplomasi dengan negara lain.

Wonderful Indonesia, yang mulai hadir sejak Januari 2011 jugamemiliki tugas untuk menepis segala citra negatif yang muncul di negara lain mengenai Indonesia, dan kembali memunculkan citra positif bagi Indonesia. Citra negatif muncul ketika media mulai memberitakan hal-hal yang negatif tentang Indonesia, termasuk seperti pada tahun 2014, dimana Indonesia mengeluarkan kebijakan penenggelaman kapal, dan kemudian media Malaysia mulai memberikan respon negatifnya (Investment 2018).

Sebelumnya Indonesia memang telah melakukan program-program *Wonderful Indonesia* ke Malaysia yang dilakukan oleh kementerian pariwisata. Namun, setelah adanya kecaman dari publik Malaysia paska penenggelaman kapal, *Wonderful Indonesia* semakin gencar melakukan promosi di Malaysia, dengan tujuan untuk memperbaiki citranya, dan mempertahankan kunjungan wisatawan Malaysia yang akan ke Indonesia. Komensaris jendral Indonesia mulai mempromosikan *Wonderful Indonesia* di Penang, yang merupakan

salah satu kota yang ada di Malaysia. Promosi ini dilakukan pada acara Malaysia International Travel Mart, atau MITM di Penang (Adv 2018). Konsulat Jendral Indonesia, Iwanshah Wibisono mulai mempromosikan *WonderfulIndonesia* dengan menyebutkan destinasi-destinasi pariwisata yang ada diIndonesia. Beberapa destinasi yang dipromosikan beliau adalah Bali, Lombok, Batam, Joglosemar, Danau Toba, Bandung, hingga Raja Ampat di Papua (Adv 2018). Selain itu, beliau juga menambahkan rekomendasi kuliner bagi para calon wisatawan asal Malaysia. Ikut sertanya konsulat jendral Indonesia dalam mempromosikan wisata Indonesia melalui *Wonderful Indonesia* dapat memperlihatkan kepada masyarakat Malaysia bahwa Indonesia adalah negara yang ramah, bahkan perwakilannya langsung turut serta dalam mempromosikannya. Hal ini juga mendapat respon positif dari *ChairmanMalaysian Chinese Tourism Association*, atau MCTA yang diwakili oleh Andy Chuah, dimana ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki destinasi yang sangat indah. Hal ini menjadikan Menteri Pariwisata, Arief Yahya ikut berbahagia dengan adanya dukungan yang diberikan oleh *Chairman* MCTA, dan juga partisipasi dari konjen Indonesia sendiri.

Program-program *Wonderful Indonesia* di Malaysia merupakan diplomasi publik yang dilakukan untuk memperbaiki citra Indonesia di Malaysia. Dimana *Woderful Indonesia* diharapkan dapat merubah persepsi yang ada di publik Malaysia tentang Indonesia. *Wonderful*

Indonesia juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang ramah, tidak seperti yang dikatakan sebelumnya oleh publik Malaysia. Upaya ini juga diharapkan dapat tetap mempertahankan jumlah wisatawan Malaysia yang melakukan kunjungan ke Indonesia paska adanya kebijakan penenggalaman kapal.

Wonderful Indonesia akhirnya mendapatkan respon positif dari publik Malaysia. Dimana pada tahun 2017, wisatawan Malaysia melakukan kunjungan sebanyak 1.238.376, dan menempati urutan keempat dari jumlah kunjungan terbesar di dunia. Pada tahun 2018 ini, Indonesia menargetkan dapat menaikkan jumlah wisatawan Malaysia menjadi lebih banyak 13% dari tahun 2017 (Setiawan 2018).

Dengan adanya *Wonderful Indonesia*, dan program yang dilakukannya yang menunjukkan nilai keramahan dari Indonesia, dapat mengubah cara pandang publik Malaysia yang sebelumnya mengecam Indonesia atas kebijakan penenggalaman kapal yang dilakukan Indonesia kepada kapal milik Malaysia, dan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan jumlah wisatawan Malaysia ke Indonesia paska adanya kebijakan penenggalaman kapal.

Pendekatan Alternatif (*An Alternative Approach*)

Pendekatan alternatif atau *an alternative approach* adalah suatu kegiatan yang dilakukan diluar dari skema yang besar, namun memiliki strategi yang terencana serta tujuannya yang sangat jelas. Setelah citra Indonesia memburuk dikalangan publik Malaysia, Indonesia mulai

melakukan beberapa pendekatan alternatif untuk memperbaiki citranya itu.

Indonesia melakukan sebuah pendekatan alternatif kepada Malaysia melalui kaum ibu-ibu atau perempuan di lingkungan konsulat Jenderal RI di Malaysia. Indonesia melakukan beberapa acara seperti mengangkat tema budaya yang bertajuk Pesona Budaya Nusantara, yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016. Tidak hanya menampilkan pertunjukan budaya, Indonesia juga menyuguhkan beberapa acara adat, busana, tari asal Indonesia, kuliner, dan jugamempromosikan seni milik Indonesia. Acara ini dihadiri oleh ibu-ibu atau perempuan Malaysia, yang merupakan istri dari pejabat Malaysia, pengusaha, pemimpin organisasi, hingga tokoh masyarakat Malaysia (Saju 2018).

Acara ini juga sebagai cara Indonesia untuk mengembalikan dan meningkatkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Dapat dilihat antusias dari para wanita Malaysia yang hadir didalam acara ini. Konsul Jendral Indonesia mengatakan bahwa KJRI juga mendukung acara ini untuk mempererat kembali hubungan Indonesia dan Malaysia, dan sebagai bentuk mempromosikan budaya Indonesia. Dengan adanya acara ini, diharapkan dapat mengubah kembali persepsi dari Malaysia mengenai Indonesia, dan membangun kembali citra positif Indonesia di Malaysia.

Setelah dilakukannya diplomasi publik tersebut, diharapkan hubungan kedua negara ini semakin membaik, dan citra Indonesia bisa kembali baik di Malaysia. Hal ini juga mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara ini. Jika citra Indonesia kembali baik di Malaysia, maka hubungan bilateral yang telah dijalin juga tetap berjalan dengan baik. Mengingat Malaysia memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia. Setelah dilakukannya kegiatan diplomasi publik ini juga diharapkan para ibu-ibu yang hadir akan terus melakukan silaturahmi, dan menjaga hubungan baik dengan Malaysia. Hubungan yang baik ini dapat mengembalikan citra positif bagi Indonesia.

Tabel 1 Diplomasi Publik Indonesia ke Malaysia Paska Kebijakan Penenggalaman Kapal

Diplomasi Publik	Upaya yang dilakukan	Indikator	Keterangan
Pengelolaan Berita/News mangement	Wartawan Indonesia mengeluarkan pemberitaan di media online Indonesia (liputan6.com, detik.com, republika, kompas.com, tempo.co, dan merdeka.com).	-Berita tertuju untuk khalayak banyak -Jurnalisme Investigatif -Berasal dari kepala pemerintah -Terdapat kontrol bahasa -Berita disajikan seimbang untuk publik dalam	Media online Indonesia mengeluarkan pemberitaan mengenai kebijakan penenggalaman kapal yang merupakan bentuk ketegasan dalam menerapkan undang-undang nasional Indonesia, bukan sebuah bentuk keangkuhan seperti yang dituduhkan Malaysia sebelumnya.

		negeri dan luar negeri	
	Pengelolaan berita melalui Kementrian Kelautan Dan Perikanan (KKP).	- Video tertuju untuk Youtube khalayak banyak - Video berisi tentang klarifikasi dari Menteri Susi Pudjiastuti mengenai kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia.	Menteri Susi Pudjiastuti melalui akun Youtube KKP mengunggah sebuah video yang berisi tentang klarifikasi dari kebijakan penenggelaman kapal.
Country as Brand	Wonderful Indonesia	Re-branding dari Indonesia untuk memperbaiki kembali citranya di Malaysia.	Indonesia melakukan program melalui Wonderful Indonesia untuk memperbaiki citranya, dan dianggap sebagai negara yang ramah.
Pendekatan Alternative/ Alternative approach	Expo Pesona Budaya Nusantara yang dilakukan bersama Ibu-Ibu di Malaysia.	Mengundang tokoh perempuan penting di Malaysia untuk hadir didalam acara ini.	Acara ini mengundang perempuan-perempuan yang merupakan tokoh penting di Malaysia untuk dapat mengikuti serangkaian acara yang ada seperti peragaan busana, tari-tarian, kuliner dan promosi seni

			Indonesia. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mempererat hubungan Indonesia dan Malaysia yang memang belakangan ini seringkali memiliki konflik, seperti paska penenggalaman kapan milik Malaysia di Indonesia, dengan adanya acara ini diharapkan kedua negara ini semakin membaik dan dapat memberikan citra positif bagi Indonesia.
--	--	--	--

Sumber : Diolah oleh peneliti

Hubungan Internasional antara beberapa negara dapat memunculkan isu-isu baru. Isu ini selalu berkaitan dengan masalah ekonomi, keamanan, dan politik. Selain isu tersebut, muncul sebuah isu lainnya yang berkaitan dengan citra positif milik negara. Citra positif menjadikan negara-negara yang ada di dunia menjadi lebih mudah dalam berinteraksi. Namun jika citra sebuah negara berubah menjadi negatif, maka interaksi antar negara juga akan sulit untuk dilakukan.

Negara yang memiliki citra negatif mulai berupaya untuk memperbaiki citranya dengan cara melakukan diplomasi publik. Seperti yang diketahui bahwa diplomasi publik sangat berpengaruh dalam mengubah cara pandang dari publik negara lain dan dapat mengembalikan citra positif dari sebuah negara. Diplomasi publik juga

dianggap sebagai upaya *soft power* untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari negara yang melakukan diplomasi publik tersebut.

Indonesia juga mulai melakukan diplomasi publik ketika citranya mulai memburuk dimata publik Malaysia. Awalnya publik Malaysia mengecam kebijakan penenggalaman kapal yang dilakukan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dimana Publik Malaysia mulai mengatakan bahwa dalam pengambil sebuah kebijakan, Presiden Joko Widodo terkesan angkuh karena menggunakan pendekatan konfrontasi. Namun sebenarnya, kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut adalah sebuah bentuk ketegasan dari seorang pemimpin, yang melaksanakan sebuah kebijakan berdasarkan dari undang-Undang milik Indonesia, bukan sebuah bentuk keangkuhan seperti yang dituduhkan oleh Malaysia.

Untuk memperbaiki citranya, Indonesia mulai melakukan diplomasi publiknya ke Malaysia. Menurut diplomasi publik yang dikemukakan oleh Kishan S. Rana, ada tiga yang perlu dilakukan untuk memperbaiki citra. Yaitu pengelolaan berita, *country as brand*, dan pendekatan alternatif. Dari ketiga cara yang dikatakan oleh Kishan S. Rana, Indonesia telah melakukan ketiganya di Malaysia untuk mempengaruhi publik Malaysia. Tiga hal yang telah dilakukan Indonesia adalah:

1. Pengelolaan berita, Indonesia telah melakukan pengelolaan berita dengan cara mengelola media *onlinenya* melalui liputan6.com, detik.com, republika, tempo.co, kompas.com, dan merdeka.com. Situs online ini mengeluarkan pemberitaan yang kemudian dapat dicapai oleh publik Malaysia. Selain pengelolaan berita pada media online, Indonesia juga mengunggah sebuah video klarifikasi mengenai kebijakan penenggalaman kapal ini melalui akun resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau KKP.
2. *Country as brand*, seperti yang diketahui bahwa Indonesia memiliki brandnya sendiri yaitu *Wonderful Indonesia* yang kemudian melakukan program-programnya di Malaysia untuk mencari perhatian publik Malaysia dan untuk mengembalikan citra Indonesia di mata publik Malaysia melalui program-program yang ada.
3. Pendekatan alternatif, yang berarti melakukan upaya yang sebelumnya tidak terencana namun memiliki tujuan yang jelas. Pendekatan ini juga berada diluar dari skema yang besar. Pendekatan alternatif yang telah dilakukan Indonesia adalah mengadakan expo yang bertajuk Pesona Budaya, dimana tujuan dari expo ini adalah untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Pada expo ini juga diisi serangkaian

acara seperti pertunjukan budaya, acara adat, busana, tari asal Indonesia, pengenalan kuliner Indonesia dan seni.

Kesimpulan

Dari diplomasi publik yang dilakukan Indonesia dapat dilihat bahwa Indonesia tampak ingin memperbaiki citranya paska adanya respon negatif yang diberikan oleh publik Malaysia mengenai kebijakan penenggelaman kapal Indonesia pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dapat menjangkau seluruh publik Malaysia yang sebelumnya tidak bisa dijangkau oleh diplomasi tradisional yang bersifat formal. Selain itu, dengan melakukan berbagai upaya tersebut, dapat memperbaiki komunikasi antara Indonesia dan Malaysia, dan hal itu juga akan memperbaiki kembali citra Indonesia di Malaysia. Dapat dilihat bahwa saat ini respon publik menjadi suatu hal yang penting bagi Indonesia. Dimana ketika publik Malaysia mulai menyampaikan respon negatifnya terkait kebijakan penenggelaman kapal, Indonesia mulai berupaya untuk memperbaiki citranya di mata publik Malaysia.

Daftar Pustaka

- Arfianto, Arief. "Illegal fishing kejahatan transnasional yang dilupakan" <https://news.detik.com/opini/d-1218292/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan-detik.com> (diakses pada 15 Februari 2018).
- Azahari, Delima. & Kusno Hadiutomo, "*Analisis keunggulan komparatif berasIndonesia*" Vo.11, no.1, 2014.
- Amanda, Gita. "*Nelayannya ditahan, Malaysia marah ke pemerintah Indonesia*" <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/04/19/o5>

- vk0i377-nelayannya-ditahan-malaysia-marah-ke-pemerintah-indonesia (diakses pada 22 Februari 2018).
- Amalia, Rosaria Mita. *“Representasi pemerintah Indonesia dalam pemberitaankasus ambalat antara Indonesia dan Malaysia: sebuah kajian analisis wacana kritis”* Bandung, 2009.
- Almuzzamil,T. Muhammad. *“Kebijakan pemerintah Indonesia dalammenanggulangi illegal fishing pada tahun 2014-2015”* Jom Fisip Vol.4No.2, Pekanbaru, 2017: 9-10.
- Abdullah, F. *“The rumpun concept in Malaysia-Indonesia relations”* 1983. Adv, *“Konjen RI Promosikan Wondeful Indonesia di Malaysia”* <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170710145927-307-226810/konjen-ri-promosikan-wonderful-indonesia-di-malaysia> diakses pada 20 mei 2018
- Bank Indonesia dan BNP2TKI, *“Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia”*. <http://www.bnp2tki.go.id/read/10950/BNP2TKI:-Prediksi-Remitansi-TKI-tahun-2015-Tercapai--> (diakses 20 Januari 2018).
- Based on personal observations, reinforced by conversations with serving foreign ministry officials.
- B. A. Hamzah, *Sinking the Ships: Indonesia’s Foreign Policy under Jokowi*. Singapore: RSIS Commentary, 2015: 1.
- Badan Informasi Geospasial, *“Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang maju dan mandiri”* 2015.
- Crouch, Harold. *“Military politics under Indonesia’s new order”* Pacific affairs, 1972.
- Dewi, Ni Kumara Santi *“Media Malaysia sebut Jokowi Angkuh”* <https://www.viva.co.id/berita/dunia/563046-media-malaysia-sebut-jokowi-angkuh> (diakses pada 22 Februari 2018).
- Detiknews, *“Ada 5 alasan kenapa peneggelaman kapal asing tak bisa diprotes”* <https://news.detik.com/berita/2769424/ada-5-alasan-kenapa-peneggelaman-kapal-asing-tak-bisa-diprotes?n992204fksberita=> diakses pada 20 februari 2018.
- Dwi Wahyu Handayani, S.IP, M.Si *“Dinamika kerjasama Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja”* universitasnegeri lampung.
- Ernis, Devy. *“Jokowi diserang media Malaysia, ini pembelaan Susi”* <https://bisnis.tempo.co/read/625409/jokowi-diserang-media-malaysia-ini-pembelaan-susi> diakses 21 Maret 2018
- Indomarine Institute, *“Nelayan di Perbatasan terlindas nelayan asing”* <http://indomaritimeinstitute.org/?p=1947> (diakses pada 05 Februari 2018).
- Ghani, Rohani Hj. Ab & Zulhilmi Paidi. *“Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara Serumpun”*. Political Managements and Policies Malaysia: 224-227.

- Hadi, Syaeful Bambang. *Geografi Regional Indonesia*. Yogyakarta, 2008: 11-19
- Handayani, Pristika. “*Perjanjian bilateral Indonesia dengan Malaysia terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI)*” Universitas Riau Kepulauan, Vol.11, no.1, 2014
- Hussain, Ku Seman Ku. “*Maaf cakap, inilah Jokowi*” <http://www.utusan.com.my/rencana/maaf-cakap-inilah-jokowi-1.28094> (diakses pada 25 Januari 2018).
- Haryanto, Joko Setiyono. “*Kebijakan peneggelaman kapal asing pelaku illegal fishing oleh pemerintah dalam perspektif hukum pidana internasional*” Vol.13, no.1, 2017.
- Indriasih, Gusti. “*Diplomasi Indonsia melalui kampanye Wonderful Indonesiadalam meningkatkan pariwisata Indonesia di dunia Internasional tahun 2011-2015*” vol.3, no.1, 2016.
- IndonesiaInvestment, “*IndustriPariwisataIndonesia*”.<https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051?searchstring=wonderful%20indonesia>(diakses pada 6 Juni 2018).
- Jannah,Selfie Miftahul, “*Susi Blak-blakan dampak maling ikan kesektor perikanan RI*” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3811975/susi-blak-blakan-dampak-maling-ikan-ke-sektor-perikanan-ri> (diakses pada 19 Februari 2018)
- Justus M. van der Kroef, ‘*Indonesia’s Economic Difficulties.*’ Vol. xvii, part 4, 1962.
- Joseph Frankel, *The Making of Foreign Policy*. (Oxford University Press, London, 1963).
- Katadata, “*Susi Pudjiastuti tenggelamkan 115 kapal selama 2016*” <https://katadata.co.id/berita/2017/01/06/susi-pudjiastuti-tenggelamkan-115-kapal-selama-2016> (diakses pada 25 Februari 2018).
- Kwa Chong Guan, and John K. Skogan, “*Maritime security in Southeast Asia*”. New York: 2007: 3-13.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), “*Menteri Susi – Peneggelaman kapal adalah amanat undang-undang*” Youtube KemluRI, “*Presiden Jokowi segera ambil langkah konkret perkuat Citra Indonesia*” <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Presiden-Jokowi-Segera-Ambil-Langkah-Konkret-Perkuat-Citra-Indonesia.aspx> (diakses pada 21 Februari 2018).
- Lisbet, “*Kasus peneggelaman kapal nelayan asing*” Jurnal Vol. VI, No.24, 2014:6.
- Maritimo, “*Agar para pencuri ikan itu kapok*”<https://maritim.go.id/agar-para-pencuri-ikan-itu-kapok/> (diakses pada 10 Maret 2018).
- Maksum, Ali. “*Poros maritim dan politik luar negeri Jokowi*” Vol.4, no.1, 2015.

- Mackie, J.A.C. *Konfrontasi: The Malaysia-Indonesia* Bandung, 1977.
- Mantau, Zuklkifli. "Daya saing komoditas jagung Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi Asean" *Vo.35. No.2*, 2016.
- Merdeka,Djarot: "Jangan sampai kita ditekan oleh Malaysia" <https://www.merdeka.com/peristiwa/djarot-jangan-sampai-kita-ditekan-oleh-malaysia.html> (diakses pada 25 Februari 2018).
- Ningrum,Desi Aditia. 'Djarot: Jangan sampai kita ditekan oleh Malaysia' <https://www.merdeka.com/peristiwa/djarot-jangan-sampai-kita-ditekan-oleh-malaysia.html> diakses pada 20 februari 2018
- Milesdan Huberman. "Analisis Data Kualitatif, dalam Fachrudin. *Teknik AnalisisData Kualitatif*", (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013).
- Mahmudah, Nunung."Illegal fishing", *Pertanggungjawaban pidana korporasi diWilayah perairan Indonesia*, Jakarta 2015.
- Mstar,"Hubungan Malaysia Indonesia tetap akrab" <http://www.mstar.com.my/berita/berita-dunia/2017/03/12/hubungan-malaysiaindonesia/#BTbGaDUIdllTajqo.99> (diakses pada 28 Mei 2018).
- Nasirin,Chairun & Dedy Hermawan, "Kontroversi implementasi kebijakan penenggalaman kapal dalam rangka pemberantasan illegal fishing di Indonesia" Vol. 12, no.1, 2017.
- Prasetya, Dion Maulana. "Seladang meski tak serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Geostrategis" *Jurnal Insignia* Vol.2, No.1, April2015: 22.
- Presidengo,"Membangun harga diri bangsa, memperbaiki citra bangsa" <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/membangun-harga-diri-bangsa-memperbaiki-citra-bangsa.html> (diakses pada 10 Maret 2018).
- Republika,"RI tangkap 4 kapal Malaysia" <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/03/28/mkd6a2-ri-tangkap-empat-kapal-malaysia> (diakses pada 18 Februari 2018).
- Rachmawati, Iva. "Karakter Diplomasi Publik Indonesia terhadap Malaysia" Vol.6, No.1 April-September, Yogyakarta, 2017: 1-2.
- Rahman, Nur Atikah A."Social media research trends in Malaysia: an analysis ofthree major communication journals in Malaysia" *Universiti PutraMalaysia*.
- Rana, Kishan S. "21st century ambassador: Plenipotentiary to chief executive"2005 (UK: Oxford University Press: 77-78).
- S, Pascal. "Diplomasi publik ala ibu-ibu diplomat" https://internasional.kompas.com/read/2016/04/20/11413811/Diplomasi.Pu_blik.ala.Ibu-ibu.Diplomat.di.Sabah. (Diakses pada 20 april 2018)

- Saravanamuttu, Johan. *Malaysia's foreign policy, 1957-1980,* Government and Politics of Malaysia, Singapore; Oxford University press.
- Sari, Elisa Valenta. "Menteri Susi cuek kebijakannya dikomentari media Malaysia," <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20141201145248-92-14987/menteri-susi-cuek-kebijakannya-dikomentari-media-malaysia> (diakses pada 18 juni 2018)
- Setiawan, Agus. "Alasan Wonderful Indonesia hadir hingga tiga pameran di Malaysia" <https://www.antaraneews.com/berita/693076/alasan-wonderful-indonesia-hadir-hingga-tiga-pameran-di-malaysia> (diakses pada 20 mei 2018)
- Setkab, "Presiden Jokowi: segera ambil langkah konkret perkuat citra Indonesia" <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Presiden-Jokowi-Segera-Ambil-Langkah-Konkret-Perkuat-Citra-Indonesia.aspx> (diakses pada 20 februari 2018)
- Sukma, Rizal. *The evolution of Indonesia's foreign policy,* Asian Survey, vol.35, no.3, 1995.
- Subadi, Tjipto. "Tenaga kerja Indonesia di Malaysia (Studi kasus TKW asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenemologi)" Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.24, no.2, 2010
- Sosiawan, Ulang Mangun dkk. "Laporan akhir penelitian hukum tentang mekanisme penyelesaian konflik antar negara dalam pengelolaansumberdaya kelautan" badan hukum dan HAM, 2015.
- Trisni, Sofia, "Strategi Indonesia dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada masa kepemimpinan presiden SBY" vol.5, no.2, 135 Viva," *Media Malaysia: Maaf cakap, inilah jokowi*" <https://www.viva.co.id/berita/dunia/563046-media-malaysia-sebut-jokowi-angkuk> (diakses pada 22 Januari 2018).
- W.R Roff, *The origins of Malay nationalism* Kuala Lumpur: Oxford university press, 2007.
- Wirakusuma, K. Yudha. "Konflik RI-Malaysia Media pencitraan SBY di LN" <https://news.okezone.com/read/2010/09/08/337/371428/konflik-ri-malaysia-media-pencitraan-sby-di-ln> (diakses pada 22 Februari 2018).
- Wardhani, *Trends in Indonesia-Malaysia bilateral relations in Post-Suharto period* Airlangga University, Surabaya, Indonesia.
- Warta ekspor, "Membangun national branding" Djpen, 002, 04.
- Yazid, Mohd. *Malaysia-Indonesia Relations before and after 1965: impact bilateral and regional stabilitu* university Malaysia Sabah, Malaysia.

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini.

Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan dari Pembimbing 1 (Sofia Trisni, S.IP, MA (IntRel)) dan Pembimbing 2 (Rika Isnarti, S.IP, MA (IntRel))

Biografi

Umaya Beby Umanda merupakan alumni dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Minat penelitiannya adalah tentang Diplomasi Publik, juga hubungan Indonesia-Malaysia. Penulis dapat dihubungi melalui email: imelda.beby@yahoo.com